

EVALUASI KEBIJAKAN PPDB ZONASI PADA SMPN 26 BEKASI BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2024

Muhammad Anhar Tanjung

Email: anhartanjung82@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi di SMP Negeri 26 Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024. Evaluasi dilakukan menggunakan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan zonasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pihak sekolah, dan orang tua siswa. Analisis dilakukan dengan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah memberi dampak positif terhadap akses pendidikan berbasis domisili, namun efektivitasnya masih terhambat oleh manipulasi data, daya tampung terbatas, dan ketimpangan kualitas sekolah. Efisiensi dan kecukupan belum maksimal akibat kendala teknis dan kurangnya pemahaman masyarakat. Pemerataan dan responsivitas mulai terwujud, namun masih memerlukan peningkatan. Ketepatan arah kebijakan sudah terlihat, meski belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendidikan. Faktor pendukung dalam kebijakan ini mencakup kesiapan sekolah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas dan resistensi terhadap sistem zonasi. Penelitian ini merekomendasikan pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar lebih adil dan merata.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, PPDB Zonasi, Pendidikan, Kota Bekasi

ABSTRACT

The Zoning-Based School Admission Policy (PPDB) is a government initiative aimed at ensuring equitable access to education. This study seeks to evaluate the implementation of the PPDB zoning policy at SMP Negeri 26 Bekasi based on Bekasi Mayor Regulation Number 8 of 2024. The evaluation uses six indicators proposed by William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Additionally, the study aims to identify the supporting and hindering factors in the policy's implementation. This research adopts a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consist of representatives from the Bekasi City Education Office, school officials, and parents. Data were analyzed through source triangulation. The findings indicate that the zoning policy has had a positive impact on improving access to education based on domicile. However, its effectiveness is hindered by data manipulation, limited school capacity, and disparities in school quality. Efficiency and adequacy remain suboptimal due to technical challenges and the public's limited understanding of the policy. Equity and responsiveness have begun to take shape, though they still require improvement. The appropriateness of the policy is aligned with the goal of educational equity, yet structural inequalities persist. Supporting factors include school readiness and community participation, while hindering factors involve inadequate facilities and resistance to the zoning system. This study recommends equal distribution of educational resources, enhanced policy dissemination, and stronger oversight to ensure a fairer and more inclusive implementation of the PPDB zoning policy.

Keywords: Policy Evaluation, Zoning-Based Admission, Education, Bekasi City

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Pendidikan juga memegang peranan strategis dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan yang merata dan berkualitas adalah syarat mutlak bagi terciptanya keadilan sosial. Namun, ketimpangan dalam akses dan

kualitas pendidikan masih menjadi persoalan besar di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan ketidakseimbangan distribusi sekolah.

Pemerintah pusat menetapkan sistem zonasi dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun 2017, yang kemudian terus mengalami penyempurnaan. Sistem zonasi adalah kebijakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Tujuan utama dari sistem ini

adalah untuk memastikan bahwa setiap anak dapat bersekolah di tempat terdekat dari domisilinya, mengurangi kesenjangan akses, serta mendorong pemerataan mutu pendidikan.

Pemerintah Kota Bekasi mengimplementasikan sistem ini melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB pada jenjang SD dan SMP. Dalam peraturan ini, jalur zonasi ditetapkan sebagai jalur utama dengan porsi 52% dari total daya tampung siswa baru. Jalur ini didasarkan pada sistem pengukuran jarak secara digital menggunakan koordinat geografis dan titik lokasi sekolah. Perwali ini juga mengatur ketentuan verifikasi domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di lingkungan Kota Bekasi.

Pelaksanaan sistem zonasi di Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Bekasi sebagai kota urban dengan kepadatan penduduk yang tinggi menghadapi keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri, terutama sekolah favorit. Selain itu, muncul berbagai permasalahan teknis dan sosial seperti manipulasi data domisili, ketimpangan fasilitas antarsekolah, serta resistensi masyarakat

yang belum memahami tujuan utama kebijakan ini.

SMPN 26 Kota Bekasi merupakan salah satu sekolah negeri unggulan yang terletak di wilayah padat penduduk dan selalu menjadi incaran para orang tua siswa. Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan kualitas pengajaran yang dianggap baik. Akibatnya, SMPN 26 kerap mengalami lonjakan pendaftar yang tidak sebanding dengan dayaampungnya. Fenomena ini menimbulkan berbagai dinamika dalam implementasi kebijakan zonasi, terutama dalam hal keadilan penerimaan siswa dan kepatuhan terhadap regulasi domisili.

Pemilihan SMPN 26 sebagai lokasi studi dilakukan karena sekolah ini dianggap mewakili tantangan-tantangan utama dalam implementasi zonasi di perkotaan. Sekolah ini menjadi cerminan dari ketimpangan minat pendaftar, persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri favorit, dan keterbatasan sarana dibandingkan jumlah kebutuhan. Oleh karena itu, kajian terhadap sekolah ini akan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan zonasi diterapkan dan sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Studi ini memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan PPDB zonasi di

SMPN 26 Bekasi, dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran utuh mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pemerataan pendidikan di daerah perkotaan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di SMPN 26 Kota Bekasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi dan saran strategis bagi perbaikan kebijakan zonasi di masa mendatang.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003) digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi

kebijakan bukan hanya sekadar melihat hasil akhir, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan mencerminkan upaya sistematis untuk memahami keberhasilan atau kegagalan dari suatu intervensi pemerintah dalam memecahkan masalah publik. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dunn mengajukan enam kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Efektivitas (Effectiveness), Mengukur sejauh mana hasil kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam menghasilkan output yang diharapkan.
- 2) Efisiensi (Efficiency), Mengacu pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila mampu mencapai tujuan dengan biaya yang rendah.

- 3) Kecukupan (Adequacy), Menilai sejauh mana kebijakan dapat mengatasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara substansial.
- 4) Pemerataan (Equity), Melihat apakah kebijakan mampu memberikan manfaat secara adil kepada semua pihak, khususnya kelompok rentan atau yang sebelumnya terpinggirkan.
- 5) Responsivitas (Responsiveness), Mengkaji sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat.
- 6) Ketepatan (Appropriateness), Menganalisis apakah kebijakan tersebut memang merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Model evaluasi ini sangat relevan untuk digunakan dalam menilai kebijakan PPDB zonasi yang bertujuan menciptakan keadilan dalam akses pendidikan.

2. Konsep Zonasi Pendidikan

Zonasi pendidikan merupakan pendekatan kebijakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah. Kebijakan ini diterapkan untuk menghapuskan sistem seleksi

berdasarkan nilai semata, serta mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, sistem zonasi diatur agar siswa dapat bersekolah di lingkungan terdekat dengan tempat tinggal mereka. Zonasi memiliki sejumlah prinsip dasar, yaitu:

- 1) Dekat rumah, dekat sekolah: Untuk mengurangi beban biaya transportasi dan meningkatkan partisipasi belajar.
- 2) Pemerataan akses dan mutu: Mendorong perbaikan kualitas sekolah di semua wilayah.
- 3) Keadilan sosial: Menjamin semua siswa memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan prestasi akademik, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Implementasi sistem ini sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan daya tampung sekolah, manipulasi domisili, dan ketimpangan fasilitas antar sekolah yang menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan teoritis ini menjadi penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan zonasi di tingkat lokal, seperti di Kota Bekasi. Zonasi

adalah pembagian wilayah geografis berdasarkan radius tempat tinggal peserta didik terhadap sekolah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akses, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan zonasi di SMPN 26 Kota Bekasi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, dinamika kebijakan, serta persepsi dari para pemangku kepentingan secara utuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Wakil Kepala Sekolah SMPN 26, pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, serta orang tua siswa; (2) observasi langsung di lingkungan sekolah untuk melihat situasi fisik, kondisi sarana prasarana, dan proses PPDB; dan (3) studi dokumentasi yang meliputi penelaahan terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024, data pendaftar dan

siswa diterima, serta berita acara pelaksanaan PPDB.

Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan posisi dan keterkaitan mereka dengan implementasi kebijakan. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari Wakil Kepala Sekolah SMPN 26, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, staf perencanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan, serta lima orang tua siswa dari latar belakang yang berbeda.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan PPDB Zonasi

1) Efektivitas

Kebijakan zonasi dinilai cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan berdasarkan domisili. Sebagian besar siswa diterima dari lingkungan sekitar sekolah, sehingga mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi

pendidikan. Namun, efektivitas ini masih terhambat oleh praktik manipulasi domisili yang dilakukan sebagian orang tua. Selain itu, sekolah dengan daya tampung terbatas seperti SMPN 26 tidak mampu mengakomodasi seluruh pendaftar yang memenuhi kriteria zonasi, sehingga beberapa siswa tetap tidak diterima meskipun tinggal dalam radius dekat.

2) Efisiensi

Sistem zonasi memberikan efisiensi dari sisi jarak tempuh dan waktu perjalanan siswa. Dengan memilih sekolah di dekat rumah, siswa tidak memerlukan kendaraan bermotor atau transportasi umum, sehingga menghemat biaya. Namun, ketidakseimbangan distribusi sekolah menyebabkan beberapa zona memiliki banyak pendaftar tetapi sedikit sekolah, sementara zona lain justru sebaliknya. Hal ini mengurangi efisiensi dari sistem secara menyeluruh.

3) Kecukupan

Secara umum, jumlah daya tampung sekolah belum mencukupi jumlah permintaan pendaftar, khususnya di sekolah favorit seperti SMPN 26 Bekasi. Sarana dan prasarana yang tersedia juga belum

merata. Beberapa sekolah belum memiliki laboratorium, perpustakaan, atau fasilitas penunjang lainnya yang memadai. Kecukupan menjadi aspek yang perlu diperhatikan jika pemerataan pendidikan ingin dicapai.

4) Pemerataan

Penerapan zonasi telah mendorong pemerataan siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Siswa dari keluarga tidak mampu memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri. Namun, pemerataan fasilitas antar sekolah belum tercapai. Masih banyak sekolah yang minim fasilitas sehingga kualitas pendidikan yang diterima tidak setara. Hal ini memicu kecenderungan orang tua tetap memilih sekolah favorit meskipun bertentangan dengan prinsip zonasi.

5) Responsivitas

Sekolah dan pemerintah menunjukkan respons yang cukup baik dalam melaksanakan kebijakan ini. Sosialisasi dilakukan secara daring dan luring, serta dibukanya posko bantuan teknis selama masa pendaftaran. Namun, sebagian masyarakat masih mengalami kebingungan dan kesulitan teknis dalam pendaftaran daring. Hal ini

menandakan bahwa meskipun institusi cukup responsif, belum semua kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal.

6) Ketepatan

Kebijakan zonasi tepat dalam menjawab masalah ketimpangan akses pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, belum semua aspek diperhitungkan dengan matang. Ketimpangan fasilitas, praktik manipulasi data, serta resistensi dari masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu penyempurnaan lebih lanjut.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi dan Upaya Yang Dilakukan

Pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi menghadapi berbagai kendala yang muncul selama proses penerimaan peserta didik baru. Kendala-kendala tersebut memengaruhi tercapainya tujuan pemerataan akses pendidikan. Salah satu kendala utama adalah ketidakseimbangan jumlah pendaftar antar zona. Jumlah pendaftar di SMPN 26 Bekasi sangat tinggi karena sekolah ini dianggap sebagai sekolah favorit sehingga daya tampung sekolah

tidak sebanding dengan jumlah pendaftar yang memenuhi syarat. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat di kalangan calon peserta didik.

Kendala berikutnya adalah adanya praktik manipulasi domisili. Beberapa orang tua memindahkan alamat pada Kartu Keluarga agar anak terlihat masuk dalam radius zona sekolah tujuan. Praktik ini menyulitkan panitia dalam memverifikasi data dan menghambat tercapainya tujuan pemerataan. Selain itu, stigma sekolah favorit di kalangan masyarakat juga masih kuat. Masyarakat cenderung mengutamakan sekolah tertentu sebagai pilihan utama tanpa mempertimbangkan letak zona atau kualitas sekolah lainnya.

Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah negeri menjadi kendala berikutnya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tersebut sehingga kebijakan zonasi belum sepenuhnya meratakan persebaran peserta didik. Daya tampung sekolah negeri yang terbatas juga membuat sebagian siswa harus melanjutkan pendidikan di sekolah

swasta. Di samping itu, muncul masalah sosial di lingkungan sekolah seperti kesenjangan mutu dan kesulitan adaptasi keberagaman siswa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengatasi kendala tersebut. Sekolah melakukan verifikasi data secara berlapis hingga ke lapangan dan menyediakan pusat bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan saat pendaftaran daring. Sekolah juga menekankan pembinaan karakter dan pengelolaan kelas agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Dinas Pendidikan memberikan pelatihan teknis kepada petugas dan guru agar memahami sistem dan tata cara pelaksanaan zonasi.

Dinas juga mempersiapkan sarana prasarana teknologi untuk mendukung pendaftaran daring serta bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sinkronisasi data domisili. Bantuan biaya pendidikan diberikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selain itu, Dinas merencanakan penambahan ruang kelas dan pembangunan unit

sekolah baru sebagai upaya jangka panjang.

3. Analisis Peneliti & Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam 6 indikator evaluasi oleh Willian Dunn, Peneliti menemukan fakta bahwa Evaluasi PPDB Zonasi pada SMPN 26 Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat terpenuhinya 6 aspek indikator yakni, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian seperti ketimpangan kualitas sekolah, ketimpangan daya tampung, dan nasib siswa yang tidak mendapatkan sekolah.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Beberapa permasalahan yang ditemukan seperti manipulasi domisili, tidak meratanya sosialisasi, serta keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi catatan penting dalam evaluasi ini. Meskipun keenam indikator terlihat

terpenuhi secara administratif, implementasinya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan PPDB Zonasi perlu penguatan dalam hal pengawasan, pemerataan mutu antar sekolah, dan penyebaran informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024 dapat disimpulkan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Banyaknya masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, pelaksanaan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi belum berjalan optimal. Dari sisi efektivitas, zonasi memang meningkatkan akses bagi siswa sekitar sekolah, tetapi praktik manipulasi domisili dan orientasi masyarakat pada sekolah favorit masih menjadi masalah. Efisiensi juga belum tercapai sepenuhnya karena ketidaksiapan teknis dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem. Dalam hal kecukupan, daya tampung

sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar, sehingga memengaruhi kualitas pembelajaran. Pemerataan belum terwujud karena distribusi siswa tidak merata dan sekolah favorit masih mendominasi. Responsivitas pemerintah dan sekolah sudah ada, namun belum menjangkau kelompok masyarakat yang kurang akses informasi. Sementara itu, dari aspek ketepatan, kebijakan zonasi belum didukung oleh sistem evaluasi dan pengawasan yang kuat.

Pelaksanaan kebijakan PPDB Zonasi di SMPN 26 Bekasi masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi jumlah pendaftar yang tidak seimbang antar zona. Selain itu terdapat manipulasi domisili, anggapan sekolah favorit, keterbatasan sarana dan prasarana, daya tampung sekolah yang terbatas, dan munculnya masalah sosial di lingkungan sekolah. Sekolah dan Dinas Pendidikan sudah berusaha mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain verifikasi data secara teliti, bantuan untuk orang tua saat pendaftaran, pelatihan untuk petugas, perbaikan sistem teknologi, kerja sama dengan instansi lain

untuk data domisili, pemberian bantuan biaya untuk sekolah swasta, dan rencana menambah ruang kelas atau sekolah baru. Upaya ini menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki pelaksanaan zonasi agar lebih adil dan merata. Perbaikan dan pengawasan tetap perlu dilakukan agar tujuan zonasi benar-benar tercapai.

Kebijakan ini masih memiliki berbagai persoalan di lapangan, mulai dari

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi, secara konsisten melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar kebijakan zonasi dapat dilaksanakan secara adil. Selain itu, peningkatan kapasitas sekolah di zona padat penduduk harus menjadi prioritas agar daya tampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah-sekolah juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan RT/RW setempat dalam proses verifikasi domisili agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Terakhir, disarankan agar evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan secara internal oleh instansi terkait, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk menilai keefektifan dan dampaknya secara langsung.

manipulasi domisili hingga lemahnya pengawasan dan sosialisasi. Zonasi belum mampu menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem teknis, dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar kebijakan ini dapat benar-benar berjalan sesuai tujuan.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan, antara lain: melakukan

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi, secara konsisten melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar kebijakan zonasi dapat dilaksanakan secara adil. Selain itu, peningkatan kapasitas sekolah di zona padat penduduk harus menjadi prioritas agar daya tampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah-sekolah juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan RT/RW setempat dalam proses verifikasi domisili agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Terakhir, disarankan agar evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan secara internal oleh instansi terkait, tetapi juga melibatkan partisipasi

masyarakat untuk menilai keefektifan dan dampaknya secara langsung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan, antara lain: melakukan pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri agar tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah favorit; memperkuat pengawasan terhadap praktik manipulasi alamat domisili guna menjaga keadilan seleksi; menambah daya tampung sekolah dengan membangun ruang kelas baru di wilayah padat penduduk; meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sistem zonasi; serta melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan agar selalu sesuai dengan dinamika di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Oktaviana, T. (2022, September 28). *Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Kode Pos di Kota Bekasi*. Retrieved from Kompas.com.
- Geografis dan Demografis*. (n.d.). Retrieved from DPMPTSP Kota Bekasi: <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id/mengapa-kota-bekasi/geografis>
- Administrasi Kota Bekasi*. (2014, Januari 26). Retrieved from Petatematikindo.
- Purwanto, A. (24, September 2021). *Kota Bekasi: Kota Satelit yang Jadi Hunian Kaum Urban dan Sentra Industri*. Retrieved from Kompas.com.
- Darmawan, A. D. (2024, Desember 03). *Jumlah Penduduk Kota Bekasi 2,53 Juta Jiwa Data per 2024*. Retrieved from databoks.
- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*.
- Religi Cipta Dewi, A. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI SMP NEGERI DI KOTA BEKASI. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1-17.
- FITRI RACHMADHANY, .. (. (2021). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI KOTA BEKASI .
- Messy Ani Safitri, R. Y. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*.
- Sari, N. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . *Journal of Social and Policy Issues*.
- CLARINTA, K. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI SEKOLAH TERHADAP JANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI . *Universitas Negeri jakarta*.
- Raden Alif Ristiawan Putra Putra, A. S. (2024). EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI

- DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI . *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Hasbullah, S. A. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Jurnal Unitri*.
- Hiskia Renaldi Setiawan, T. R. (2021). EVALUASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA SURABAYA . *Jurnal Publika*.
- Chatarina Sitoesmi Triwiniastuti, B. S. (2020). Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan . *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Difa Cucu Sabrina, I. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA PEKANBARU. *NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Erni Saharuddin, M. S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Sinaga, D. (2020). efektivitas penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017. *Jurnal Suluh Pendidikan*.
- SMPN 26 Kota Bekasi. (n.d.). *Struktur Organisasi*. Retrieved from <https://smpn26kotabekasi.sch.id/Struktur>
- Subagperlap. (2020, Januari 3). *Struktur Organisasi Baru Dinas Pendidikan Kota Bekasi*. Retrieved from Disdik Kota Bekasi: <https://disdik.bekasikota.go.id/berita/detail/struktur-organisasi-baru-dinas-pendidikan-kota-bekasi>
- Kota Bekasi Situs PPDB Periode 2022 / 2023*. (n.d.). Retrieved from PPDB Online: <https://arsip.siappdb.com/2022/bekasi/#/>
- Kuota SPMB SMP Kota Bekasi*. (n.d.). Retrieved from SPMB Kota Bekasi: <https://spmb.bekasikota.go.id/home>
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Jerianto Launuha, F. A. (2021). Implementasi Sistem Zonasi. *Journal of Education Management*.
- Dian Purwanti, I. I. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Governasi*.
- Dany Miftahul Ula, I. L. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Riset dan Konseptual*.
- Gunarti Ika Pradewi, R. R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*.
- Hanafi, A. A. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN

- YANG INKLUSIF MELALUI SISTEM ZONASI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA. : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF MELALUI SISTEM ZONASI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA. *Jurnal Solidaritas*.
- Qhuraydillah, M. O. (2025). Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang) . *Journal of Politic and Government Studies*.
- Nanggala, A. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Nur'aini Fadhillah Fadhillah, E. n. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertam. *Wijayakusuma Law Review*.
- Geby Theresia Br Sagala, M. A. (2024). Kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan Atas Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Kecamatan Medan Baru . *JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI*.
- Purwanti, D. (2018). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI BAGI SISWA RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Azizah Arifinna Safarah, U. B. (2018). PROGRAM ZONASI DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*.
- PERDANA, N. S. (2019). IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM UPAYA PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN. *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER*.